

UPAYA PENGELOLAAN BLOK MAHAKAM OLEH PEMERINTAH KALTIM BERSAMA PERTAMINA PASCA KONTRAK KARYA TOTAL 2014-2017

Indah Pratiwi¹
Nim. 1102045227

Abstract

The Blok Mahakam has been managed by PT.Total E&P Indonesia for 50 years, and the contract expires in 2017, so that Kaltim Government and Pertamina are trying to take over. The purpose of this study is to describe the efforts to manage Blok Mahakam by Kaltim Government with Pertamina after Cooperative Contract of Total Company. This study used descriptive research method. Energy Security and Multinational Corporation concept as conceptual framework are used to answer the research question. This research used the secondary data. The results showed that the efforts of the Kaltim Government with Pertamina has succeeded in taking over the rights of the Blok Mahakam from PT. Total E & P Indonesia. Efforts that have been done are the Governor of East Kalimantan invites local stakeholders to fight the rights of oil and gas fields Blok Mahakam, Filing for KKS Amount not renewed, Coordinate with PT. Migas Mandiri Pratama (MMP), Kaltim Local Company, to prepare the blueprint in the management plan, Facilitate the permit related to workmanship of Mahakam area from Total E & P Indonesia to Pertamina Hulu Mahakam (PHM). While Pertamina's business has submitted a letter to the Indonesian government. In November 2014, it has found the oil fund of Blok Mahakam, Pertamina has also sent to the Minister of Energy and Mineral Resources with the intention that Pertamina is ready to manage the Blok Mahakam, Pertamina has submitted a proposal the management of the Blok Mahakam to the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) in February 2015, Pertamina has made preparations, namely the acceleration of drilling in 15 wells until the end of 2017 and the reservoir thickening.

Keywords: Blok Mahakam, East Kalimantan Government, Pertamina, Total E&P Indonesia

Pendahuluan

Blok Mahakam adalah sebuah lapangan minyak dan gas (migas) potensial yang terletak di lepas pantai Kalimantan Timur. Blok Mahakam dapat dikatakan sebagai lapangan migas yang berkontribusi besar bagi pemenuhan energi nasional dan pendapatan negara. Blok ini merupakan lapangan penghasil gas yang mencapai 30%

¹ Mahasiswa S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: indah.shopaholic@yahoo.com

produksi gas nasional. Pada saat ditemukan pertama kali, Blok Mahakam memiliki cadangan sekitar 26 *triliun cubic feet* (TCF) gas dan 1,4 miliar barel minyak (Marwan Batubara.2015:1).

Eksplorasi Blok Mahakam mulai dilakukan sejak Kontrak Kerja Sama (KKS) Blok Mahakam ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dengan Total E&P Indonesia dan Inpex Corporation (Jepang) pada 31 Maret 1967, beberapa minggu setelah Soeharto dilantik menjadi Presiden RI ke-2. Kontrak berlaku selama 30 tahun hingga 31 Maret 1997. Namun beberapa bulan sebelum Soeharto lengser, kontrak Mahakam telah diperpanjang selama 20 tahun, sehingga kontrak akan berakhir pada 31 Maret 2017 (www.satunegeri.com). Karena besarnya cadangan tersisa, pihak asing telah kembali mengajukan perpanjangan kontrak.

Disamping permintaan oleh manajemen Total, PM Perancis Francois Fillon pun telah meminta perpanjangan kontrak Mahakam saat berkunjung ke Jakarta Juli 2011. Disamping itu Menteri Perdagangan Luar Negeri Perancis Nicole Bricq kembali meminta perpanjangan kontrak saat kunjungan Jero Wacik di Paris, 23 Juli 2012. Hal yang sama disampaikan oleh CEO Inpex Toshiaki Kitamura saat bertemu Wakil Presiden Boediono dan Presiden SBY pada 14 September 2012 (www.change.org).

Padahal sesuai UU Migas No.22/2001, jika kontrak migas berakhir, pengelolaan seharusnya diserahkan kepada BUMN yaitu PT.Pertamina. Apalagi hal ini sesuai amanat konstitusi dan kepentingan strategis nasional. Pertamina pun telah menyatakan keinginan dan kesanggupan mengelola Blok Mahakam berkali-kali sejak tahun 2008 hingga tahun 2012. Namun pada tahun 2012, Kepala BP Migas R.Priyono dan Wamen ESDM Profesor Rudi Rubiandini tetap mendukung Total menjadi operator Blok Mahakam (www.change.org).

Hal tersebut menuai protes dari berbagai kalangan, sehingga menimbulkan adanya petisi yang ditujukan kepada Presiden RI Joko Widodo, Menteri ESDM, Kepala BP Migas dan DPR RI yang dibuat oleh [Indonesian Resources Studies \(IRESS\)](#) dan ditandatangani oleh anggota dan mantan anggota DPR RI, Guru Besar UI dan Universitas terkemuka di Indonesia, LIPI, Pemerintah Daerah dan beberapa organisasi terkait lainnya yang ditandatangani di Jakarta pada 10 Oktober 2012. Dari petisi tersebut semua sepakat agar ijin pengelolaan oleh Total & Inpex tidak diperpanjang pada tahun 2017. Menunjuk dan mendukung penuh Pertamina sebagai operator Blok Mahakam sejak April 2017. Menjamin pemilikan 10% saham Blok Mahakam oleh BUMD (Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Kartanegara) yang pelaksanaannya dikordinasikan dan dijamin oleh Pusat bersama Pertamina, tanpa partisipasi atau kerjasama dengan swasta (www.change.org).

Pengelolaan blok migas tersebut segera memasuki babak baru menyusul dikeluarkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016. Aturan tersebut memberikan kesempatan kepada daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk terlibat dalam alih kelola Blok Mahakam dan blok migas lainnya dengan "*Participating Interest*" (PI) 10% (www.antaranews.com). Gubernur Kaltim menyatakan, hal itu merupakan kesempatan emas bagi daerah untuk bisa terlibat lebih

jauh dalam pengelolaan sumber daya alam unggulan Kaltim dan sekaligus membuka peluang lebih besar untuk meningkatkan penerimaan asli daerah.

Pengelolaan Blok Mahakam oleh PT Pertamina (Persero) bersama Pemerintah Kaltim tanpa melibatkan PT Total E&P Indonesia dan Inpex Corporation dinilai menjadi pilihan ideal demi ketahanan energi nasional. Pertamina akan lebih banyak mendapat keuntungan dengan mengelola sendiri Blok Mahakam. Terdapat dua unsur ketahanan energi, yakni *availability* dan *affordability*. *Availability* yaitu ketersediaan dalam hal ini dari sumber daya alam Indonesia sendiri dan *Affordability* yang pada akhirnya keterjangkauan harga oleh masyarakat Indonesia sendiri. Dengan mengelola 100 persen Blok Mahakam, dengan demikian, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada minyak, sekaligus mengurangi impor dan subsidi BBM.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Konsep Energy Security

International Energy Agency (IEA) mendefinisikan keamanan/ketahanan energi sebagai ketersediaan sumber energi yang tidak terputus dengan harga yang terjangkau. Lebih lanjut, ukuran yang dipakai untuk menilai suatu negara dikatakan memiliki ketahanan energi apabila memiliki pasokan energi untuk 90 hari kebutuhan impor setara minyak. Ketahanan energi dianggap penting karena energi merupakan komponen penting dalam produksi barang dan jasa. Segala bentuk gangguan yang dapat menghambat ketersediaan pasokan energi dalam bentuk bahan bakar primer (BBM, gas dan batubara) maupun kelistrikan dapat menurunkan produktivitas ekonomi suatu wilayah dan jika *magnitude* gangguan sampai pada tingkat nasional dapat membuat target pertumbuhan ekonomi meleset dari yang ditetapkan (www.kemenkeu.go.id).

Daniel Yergin dalam tulisannya yang berjudul *Ensuring Energy Security* menjelaskan mengenai awal kemunculan keamanan energi sebagai isu global dan dianggap penting dalam studi politik dan keamanan internasional. Dalam hal ini, Yergin menjelaskan bahwa isu keamanan energi mulai menjadi isu global ketika Arab Saudi melakukan pemberhentian ekspor minyak mentah yang dimilikinya ke negara-negara industri pada awal dekade 70-an. Pada era tersebut, minyak dapat dikatakan sebagai satu-satunya sumber energi yang paling vital bagi negara-negara di kawasan Eropa Barat dan Amerika Serikat, sedangkan Arab Saudi sebagai ekspor utamanya. Tindakan sepihak yang telah dilakukan oleh Arab Saudi tersebut mengakibatkan gangguan terhadap aktivitas perekonomian negara-negara yang bergantung terhadap minyak yang dimiliki oleh Arab Saudi tersebut (Daniel Yergin.2006:70). Berangkat dari pemberhentian ekspor yang dilakukan oleh Arab Saudi, dunia internasional mulai sadar akan pentingnya menjaga pasokan minyak agar tidak bergantung pada satu jenis sumber energi dan satu produsen energi. Berangkat dari peristiwa tersebut isu energi mulai menjadi isu yang penting dan mengglobal dalam hubungan internasional.

Lebih lanjut, Yergin menjelaskan bahwa sistem keamanan energi yang ada pada era seperti saat ini diciptakan sebagai alat untuk mengkoordinasi hubungan antara negara-negara industri. Koordinasi yang dimaksud dalam hal ini meliputi berbagai macam hal, seperti berkorporasi dalam mengatasi gangguan pasokan energi, mendorong kolaborasi yang berhubungan pada kebijakan energi suatu negara, menghindari

persaingan dalam memperebutkan pasokan energi, serta mencegah penggunaan energi sebagai senjata oleh negara penghasil (Daniel Yergi.2006:70).

Jan Kalicki dan David Goldwyn dalam tulisannya yang berjudul *Energy and Security: Toward a New Foreign Policy Strategy* menjelaskan mengenai upaya yang dilakukan oleh suatu negara dalam mengatasi isu keamanan energi ini. Salah satu caranya yakni diperlukan adanya suatu kebijakan energi yang bersifat koheren dan memiliki kedudukan yang setara dengan kebijakan nasional suatu negara dalam kebijakan luar negeri yang dimiliki oleh suatu negara. Kebijakan energi memiliki kedudukan yang setara dikarenakan energi memiliki kepentingan yang sangat besar dan energi memiliki manfaat yang besar untuk mendukung kemajuan aspek-aspek yang ada pada suatu negara (Jan Kalicki & David Goldwyn.2005).

Lebih lanjut, Kalicki & Goldwyn juga menjelaskan bahwa hubungan yang ada antara keamanan energi dan kebijakan luar negeri yang dimiliki oleh suatu negeri memiliki hubungan positif yang terintegrasi dalam lingkaran konsentris. Lingkaran konsentris yang terjalin antara keamanan energi dengan kebijakan yang dimiliki oleh suatu negara ini memiliki empat poin utama. Pertama, berfungsi sebagai pertahanan fisik negara. Kedua, cadangan strategis untuk menjaga pasar domestik dari tekanan produsen ekstrem. Ketiga, sumber energi sebagai pendorong adanya pembangunan. Keempat, penggunaan energi sebagai alat promosi tujuan kebijakan luar negeri pada daerah penghasil dengan cara memperkuat tiga poin pada lingkaran sebelumnya.

Konsep MNC

Perusahaan Multinasional (Multy National Corporation) adalah suatu perusahaan yang kegiatan bisnisnya bersifat internasional dan lokasi produksinya terletak di beberapa negara. Banyak definisi yang diajukan para ahli untuk menjelaskan Multinational Corporation (MNC) atau perusahaan multinasional.

Menurut Joan Spero: "*A Multinational Corporation is a firm with foreign subsidiaries that extend the firm's production and marketing beyond the boundaries of any one country. Multinational Corporations are not simply large corporations that market their products abroad, they are firms that have sent abroad a package of capital, technology, managerial talent, and marketing skills to carry out productions in foreign countries. In many cases, the multinational's production is truly worldwide, with different stages of production carried out in different countries*" (Joan E. Spero.1985:132).

Joan Spero menambahkan bahwa pada banyak kasus proses produksi dalam sebuah MNC benar-benar mendunia, beberapa tahapan produksi yang berbedadilakukan di negara yang berbeda-beda pula. Tahap marketing juga seringkali berskalainternasional. Barang-barang yang diproduksi di satu atau lebih negara dijual hingga ke seluruh dunia. Pada akhirnya MNC cenderung mempunyai cabang atau perwakilan luar negeri di banyak negara. Dengan demikian ada karakteristik khusus yang melekat pada sebuah badan usaha agar bisa disebut sebagai perusahaan multinasional.

Negara berkembang seperti yang kita kenal sekarang ini adalah negara-negara yang kebanyakan merdeka pasca Perang Dunia II. Persoalan utama yang dihadapi setelah lepas dari kolonialisasi adalah masalah pemabangunan khususnya pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan dan pertumbuhan yang tinggi. Dalam pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang, umumnya terdapat dua pendekatan yang ditempuh para agen-agen pembangunan.

Yang pertama adalah pendekatan ortodoks. Dalam pelaksanaan strategi pembangunan yang dilakukan adalah mengoperasikan suatu bentuk sistem usaha bebas, inisiatif dan pemilikan pihak swasta, dan suatu pasar bebas yang berfungsi dalam pemerintahan yang stabil. Pendekatan ini banyak mengadopsi konsep-konsep daripada kapitalisme klasik sebagaimana pernah dialami oleh Eropa Barat pada saat memulai proses pembangunan menjadi negara-negara industri baru.

Kedua, disebut dengan pendekatan radikal. Dalam strategi pembangunan yang dilakukan, banyak mengadopsi konsep-konsep dan pemikiran radikal yang berasal dari sosialisme, marxisme/komunisme atau model-model yang diperbaharui daripada Neo Marxisme. Sementara itu ada pula konsep yang dipandang kiri (*Left Concept*) tanpa radikal dengan model jalan tengah seperti yang diterapkan beberapa negara moderat yakni sosial-demokrat; dimana paham-paham yang diadopsi tidak sepenuhnya kapitalis tetapi tidak pula Marxisme. Untuk konsep radikal yang diajukan pada umumnya menganut dasar pemikiran yang banyak berlawanan dengan konsep/teori kapitalisme; seperti usaha pemutusan hubungan dalam ikatan dengan kapitalisme barat. Negara-negara berkembang disarankan untuk tidak menerima investasi dan bantuan (pinjaman) luar negeri yang bersumber dari negara-negara barat. Sebaliknya, negara-negara berkembang harus mampu mengendalikan sendiri ekonominya. Negara berkembang harus menegakan kedaulatan para buruh atas alat-alat produksi di dalam negeri dengan merasionalisasikan industri-industri asing maupun domestik. Negara berkembang juga harus menjalankan program-program pembangunannya secara merata melalui lembaga-lembaga perencanaan pusat. Strategi pembangunan yang dijalankan harus diarahkan kepada usaha untuk mencapai swasembada dan untuk menyingkirkan penetrasi ekonomi luar negeri.

Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitik dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas obyek yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tinjauan pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan data-data sekunder yang bersumber dari buku-buku, artikel, dan data-data dari internet. Jenis data yang digunakan adalah data Sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisis data yang di peroleh dari penelitian, menggunakan metode kualitatif.

Hasil Penelitian

Upaya Pemerintah Kalimantan Timur

Para pejabat pemerintah daerah Kalimantan Timur dan Kutai Kartanegara telah berulang kali menyatakan dukungan kepada BUMN untuk mengelola Blok Mahakam. Namun dalam menyampaikan dukungan tersebut, pejabat-pejabat tersebut tak lupa menjelaskan kondisi masyarakat dan infrastruktur yang sangat terbelakang di Kaltim.

Mereka menuntut agar dalam mengeksploitasi SDA migas dan minerba di daerah tersebut, Pemerintah harus bersedia berbagi dan melibatkan keikutsertaan perusahaan milik daerah (perusda) (Marwan Batubara.2014:63).

Sejak tahun 2013 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan beberapa upaya dalam memperjuangkan alih kelola Blok Mahakam dari PT.Total E&P Indonesia, hal tersebut terlihat dari berbagai usaha Gubernur Provinsi Kaltim Awang Faroek Ishak. Pada tanggal 04 Januari 2013 Gubernur Kalimantan Timur mengajak semua pemangku kepentingan daerah untuk berjuang menuntut hak penguasaan ladang migas Blok Mahakam, perjuangan ini harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Perjuangan ini tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan jika komponen daerah ini tidak bersatu. Pesan tersebut disampaikan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak saat menerima Aliansi Rakyat Kaltim untuk Blok Mahakam (www.kaltim.antaranews.com).

Awang Faroek Ishak mengingatkan bahwa kegagalan Kaltim ketika berusaha merebut divestasi saham 51 persen PT. Kaltim Prima Coal (KPC) beberapa tahun lalu (www.kaltim.antaranews.com). Tidak bisa meraih hasil dalam perjuangan menguasai saham pengelolaan tambang batu bara terbesar di Indonesia itu karena tidak solidnya pemangku kepentingan di daerah. Oleh sebab itu Gubernur Awang Faroek menegaskan, Perjuangan ini tidak boleh dilakukan secara parsial. Harus komprehensif dan integral. Jangan sepotong-potong, tetapi harus melibatkan lintas sektor agar tujuan bisa dicapai dengan hasil yang baik pula. Gubernur juga menegaskan, perjuangan Blok Mahakam harus dilakukan untuk kepentingan rakyat. Karena itu, kepentingan individu dan kelompok harus ditinggalkan. Tidak boleh ada dikotomi provinsi dengan kabupaten dan kota, sebab muara perjuangan ini adalah untuk kepentingan rakyat.

Terkait perjuangan Blok Mahakam ini, secara pribadi Gubernur Awang Faroek menegaskan bahwa, kontrak besar pengelolaan migas seharusnya tidak lagi diperpanjang ketika kontrak berakhir. Ini harus dilakukan agar negara (termasuk daerah di dalamnya), benar-benar berdaulat atas pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki, bukan sekadar menjadi penonton.

Awang Faroek selaku Gubernur Provinsi Kalimantan Timur juga melakukan pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri ESDM pada saat itu yakni Jero Wacik guna menyampaikan pengajuan agar KKS bersama Total E&P Indonesia tidak diperpanjang. Respon positif sudah diterima Gubernur Awang Faroek, saat bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Presiden SBY mengatakan, jangan sampai Kaltim lost opportunity (kehilangan kesempatan). Sedangkan Jero Wacik berpesan, provinsi dan kabupaten/kota harus kompak.

Negara harus berani mengelola Blok Mahakam yang masih menyimpan sumber devisa ribuan triliun rupiah dan menjadi buruan investor asing, tak terkecuali Total dan Inpex. Menurut Wagub Kaltim, Farid Wadjdy, pendukung Blok Mahakam harus menanggalkan semua kepentingan pribadi dan yang sudah seharusnya menjadi milik

rakyat Kaltim. Rakyat Kaltim akan terus berupaya memperjuangkan pengelolaan ladang migas *offshore* Blok Mahakam (Marwan Batubara.2014:181).

Meski demikian, Farid mengingatkan agar perjuangan rakyat Kaltim tetap dilakukan dengan cara yang konstitusional dan tidak melanggar hukum. Rakyat Kaltim terus menuntut kedaulatan migas, namun harus dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga, berbagai elemen masyarakat daerah Kaltim perlu melakukan kajian lebih jauh tentang rencana masa depan pengelolaan Blok Mahakam.

Pemerintah Kalimantan Timur sendiri mendapatkan dukungan dari berbagai organisasi dalam memperjuangkan hak kelola Blok Mahakam diantaranya Aliansi Rakyat Kaltim untuk Blok Mahakam (ARKBM) dan Presidium Gerakan Keadilan Blok Migas Kalimantan (www.kaltim.tribunnews.com). Selain itu DPD KNPI Kaltim yang didukung oleh 73 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang selama ini tergabung di KNPI Kaltim juga siap mendukung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (www.regional.kompas.com).

Ketua Aliansi Rakyat Kaltim untuk Blok Mahakam Wahdiyati menjelaskan setelah kontrak pengelolaan migas itu berakhir, seluruh sisa cadangan migas yang masih ada di perut bumi dan seluruh fasilitas infrastruktur produksi akan menjadi milik negara. Tidak ada aturan atau kontrak yang dilanggar dan tidak ada pula hukum internasional yang dilanggar. Satu hal yang juga harus ditegaskan agar tidak menimbulkan kekhawatiran bagi para pekerja adalah tidak ada rasionalisasi dan tidak akan ada yang terganggu dari peralihan itu (dari kontraktor asing ke BUMN/BUMD).

Melalui perjuangan ini, aliansi telah melakukan berbagai hal, diantaranya berkoordinasi dengan PT. Migas Mandiri Pratama (MMP), Perusda Pemprov Kaltim, untuk menyiapkan blue print kesiapan daerah dalam rencana pengelolaan blok migas ini. Aliansi juga menyampaikan aspirasi ke DPRD Kaltim. Mereka diterima anggota Komisi II dan Komisi III. Pertemuan dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim H Sofyan Alex. Pada prinsipnya, DPRD Kaltim sangat mendukung.

Upaya selanjutnya adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berjanji mempermudah perizinan terkait alih kelola wilayah kerja Mahakam atau Blok Mahakam dari Total E&P Indonesia ke Pertamina Hulu Mahakam (PHM). Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, pada Workshop Perizinan Daerah dan Sertifikasi terkait Alih Kelola Wilayah Kerja Mahakam pada tanggal 02 Februari 2017 di Balikpapan mengatakan bahwa Pemprov Kaltim bersama semua pemerintah kabupaten dan kota berkomitmen, akan memberikan dukungan terhadap 71 perizinan dan sertifikasi yang diperlukan terkait alih kelola wilayah kerja Mahakam. Bahkan, Awang Faroek rela jika semua dialihkan ke pusat agar seluruh proses perizinan bisa cepat selesai dan operasional Blok Mahakam tidak terganggu selama masa transisi dan pasca peralihan (www.antarane.ws.com).

Upaya PT.Pertamina (Persero).

PT.Pertamina (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang juga sebagai Perusahaan Multi Nasional (MNC) yang telah memiliki pengalaman lebih dari 60 tahun. Dengan mengambil alih hak kelola Blok Mahaka, Pertamina tentunya akan

mendukung tercapainya ketahanan energi nasional. Oleh karena itu berbagai upaya telah dilakukan hingga akhirnya Pertamina berhasil mengambil alih hak kelola Blok Mahakam.

Ketika pihak Total E&P Indonesia mengajukan permohonan perpanjangan kontrak pada tahun 2008 ke pihak Indonesia, pihak Pertamina pada tahun 2009 juga menyampaikan surat ke pemerintah Indonesia terkait keinginannya dalam mengelola ladang migas Blok Mahakam. Sejak saat itu pihak Pertamina mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak termasuk Kalimantan Timur.

Upaya Pertamina dalam merebut Blok Mahakam tidak berjalan dengan mulus. Ternyata permintaan pembelian saham Total dan Inpex tidak didukung Pemerintah dan DPR RI. Total dan Inpex pun menolak untuk menjual sahamnya kepada Pertamina. Dengan demikian langkah antisipatif yang dijalankan Pertamina tersebut pun kandas tanpa hasil.

Secara esensial Pertamina telah digagalkan oleh pemerintah dan pihak asing untuk mendapatkan saham 10% hingga 25% yang diminta untuk dibeli Pertamina sebelum 2017. Hal ini diusulkan Pertamina agar terjadi transfer teknologi sebelum kontrak berakhir. Ternyata belakangan, dengan target berfungsi sebagai pengelola setelah kontrak berakhir, sekali lagi Pertamina dihalang-halangi untuk dapat melakukan aksi-aksi korporasi. Hal ini sebenarnya tidak hanya menguntungkan Pertamina yang 100% sahamnya milik negara, tetapi juga menguntungkan negara pada akhirnya (Marwan Batubara.2014:32).

Setelah gagal membeli saham Total dan Inpex, Pertamina telah berulang kali menyatakan kesiapan dan kemampuan mengelola Blok Mahakam. Misalnya pada 19 April 2009, Dirut Pertamina Karen Agustiawan, di Gedung DPR, Senayan mengatakan bahwa Pertamina siap mengambil 100% Blok Mahakam. Kesiapan Pertamina mengelola Mahakam kembali diulang oleh Dirut Pertamina pada 22 Juli 2012 di Jakarta.

Dalam surat No.300/C00000/2010-SO yang disampaikan kepada pemerintah pada tahun 2010, Pertamina mengusulkan kepada pemerintah hal-hal sebagai berikut (Marwan Batubara.2014:33):

1. Agar kontrak Blok Mahakam kepada asing tidak diperpanjang.
2. Pemerintah membuat kontrak baru dengan menyerahkannya kepada Pertamina.
3. Apabila disetujui, Pertamina dapat melakukan assignment (share down) kepada Total dan Inpex secara business to business
4. Jika butir 3 disetujui, maka Pertamina akan memiliki participating interest mayoritas, minimal 51% dengan status sebagai operator.

Usul Pertamina tersebut tidak disetujui oleh pemerintah. Dalam hal ini pihak Total dan Inpex memang akan keberatan, Karena keuntungannya akan berkurang. Masalahnya Pemerintah RI justru tunduk pada keinginan perusahaan asing tersebut, meskipun Pemerintah mempunyai otoritas dan kesempatan untuk melakukannya.

Pada akhir 2013 Pertamina kembali menyatakan kesanggupan mengelola Blok Mahakam seperti yang dikatakan Dirut, Karen di Gedung DPR, Senayan bahwa Pertamina sanggup 100% untuk mengelola Blok Mahakam. Menurut Karen, Pertamina dihargai tinggi diluar, namun di dalam negeri sendiri banyak opini negative (Marwan Batubara.2014:34).

Hingga pertengahan 2014 Pertamina masih terus mengungkap keinginannya mengelola Blok Mahakam seperti dinyatakan oleh Direktur Hulu Pertamina Muhammad Husein. Menurut Husein, Pertamina tidak ingin blok tersebut kembali diperpanjang pengelolaannya oleh perusahaan asing yang selama ini sudah mengelola blok tersebut selama hamper 50 tahun. Husein mengungkapkan, pengelolaan Blok Mahakam yang sampai saat ini masih menjadi pemasok gas terbesar di Indonesia, merupakan kesempatan besar. Alasannya di semua negara saat ini sangat membutuhkan energi dan mengandalkan BUMN-nya (Marwan Batubar.2014:38).

Pada November 2014 pihak Pertamina telah meninjau cadangan minyak ladang migas Blok Mahakam Selain itu, pada waktu yang sama. Pertamina juga telah mengirimkan surat kepada Menteri ESDM dengan maksud bahwa Pertamina siap untuk mengelola Blok Mahakam. Pertamina menegaskan bahwa pihaknya memiliki kemampuan untuk mengelola Blok Mahakam 100% pasca berakhirnya kontrak PT.Total E&P Indonesia pada 2017, baik dari sisi teknis maupun finansial (www.migas.esdm.go.id).

Untuk itu, pihak Pertamina sangat berharap agar pemerintah dapat memutuskan segera penetapan Pertamina sebagai pengelola Blok Mahakam agar ada transisi operasi yang cukup. Pihaknya juga mengungkapkan bahwa tren di dunia saat ini perusahaan nasional (*National Oil Company*) mendominasi penguasaan sumber daya migas nasional di negaranya, yang bertujuan untuk menjamin ketahanan energi nasionalnya. Sejauh ini, penguasaan sumber daya migas nasional oleh Pertamina masih relatif rendah dibandingkan dengan NOC di negara lainnya.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Kamis 05 Desember 2014, Dirut Pertamina Karen Agustiawan mengatakan Pertamina sanggup mengambil alih Blok Mahakam. Pertamina siap mengelola Blok Mahakam yang masih dikelola Total E&P Indonesia yang kontraknya akan berakhir pada 2017. Bagi Pertamina, bisa mengelola Blok Mahakam akan menaikkan kelas Pertamina sebagai perusahaan energi. Pertamina meyakinkan pemerintah Indonesia bahwa pihaknya mampu melakukan pengeboran *deep water* (pengeboran minyak di laut dalam) di negara lain. Alih kelola Blok Mahakam akan membuat Pertamina berpeluang menggarap proyek migas yang lebih besar dari Blok Mahakam (Marwan Batubara.2014:37).

PT Pertamina (Persero) telah menyerahkan proposal pengelolaan Blok Mahakam kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Februari 2015. Berdasarkan proposal tersebut, dipastikan permintaan Pertamina untuk mengelola 100% tanpa menggandeng pihak lain, termasuk Total E&P Indonesia (www.industri.kontan.co.id). Direktur Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) Pertamina, Syamsu Alam mengatakan, proposal tersebut sudah diserahkan ke

Kementerian ESDM. Artinya, perseroan hanya tinggal menunggu kepastian dari pemerintah terkait pengelolaan Blok Mahakam tersebut. Setelah proposal disampaikan pihak Pertamina pun melakukan presentasi kepada pemerintah Indonesia.

Presentasi PT Pertamina (Persero) terkait rencana pengelolaan Blok Mahakam berhasil meyakinkan pemerintah. Pertamina pun menggantikan Total E&P Indonesia yang telah menjadi operator Blok Mahakam sejak 1969. Ada beberapa poin yang menjadi paparan Pertamina (www.news.lewatmana.com):

Pertama adalah pemahaman soal Blok Mahakam, berikut cadangan yang dimilikinya. Kedua adalah pengembangan ke depan. Pertamina harus meyakinkan apa yang akan dilakukannya dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Ketiga adalah investasi yang direncanakan US\$ 25,2 miliar (Rp 302,4 triliun). Ini dimungkinkan berasal dari gabungan kas perusahaan dan pembiayaan dari dalam maupun luar negeri. Investasi tersebut adalah selama 20 tahun ke depan. Bisa dari *equity* dan *financing*. Keempat adalah rencana alih teknologi dalam operasional. Kelima adalah terkait kemanan dan lingkungan. Ada juga rencana soal transfer Sumber Daya Manusia (SDM). Supaya seluruh pekerja Total bisa pindah ke Pertamina. Dan Pertamina bisa meneruskan tingkat pengupahan. Agar para pekerja di Total tak punya alasan untuk keluar.

Akhirnya, pemerintah menetapkan kontrak kerja sama Mahakam dengan Total E&P Indonesia tidak diperpanjang dan selanjutnya menunjuk Pertamina sebagai pengelola baru. Kepala Unit Pengendalian Kinerja Kementerian ESDM, Widhyawan Prawiraatmadja mengatakan, keputusan yang diambil adalah pemerintah menyerahkan 100% pengelolaan Mahakam setelah 2017 kepada Pertamina. Selanjutnya, Pertamina berhak memutuskan bagaimana kelanjutannya apakah mengajak Total E&P Indonesia selaku operator sebelumnya atau tidak. Menurutinya, keputusan menyerahkan kepada Pertamina tersebut sesuai Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Migas. Kemudian, untuk Pasal 28 ayat 9 dan 10 PP 35/2004, disebutkan, Pertamina dapat mengajukan pengelolaan blok habis kontrak kepada Menteri ESDM. Dan, Menteri ESDM bisa menyetujui permohonan itu sepanjangan Pertamina 100% dimiliki negara (www.news.lewatmana.com).

Sebagai pengelola Blok Mahakam, Pertamina telah menyiapkan sejumlah persiapan, yakni percepatan pengeboran di 15 sumur hingga akhir tahun 2017 dan melakukan penebalan *reservoir*. Menurut Direktur Utama Pertamina Hulu Indonesia Bambang Manumayoso, setiap satu sumur yang dibor berkontribusi menambah cadangan sekitar 2-3 bcf. Ini artinya dapat menambah masa produksi blok hingga 20 tahun ke depan (www.katadata.co.id).

Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik menambahkan, lantaran usia Blok Mahakam yang sudah tua maka upaya menahan laju penurunan produksi sangat penting. Pertamina menginvestasikan dana sebesar US\$ 700 juta untuk mengebor sumur dan menyiapkan US\$ 1 miliar untuk biaya operasional di Blok Mahakam pada tahun 2018 (www.katadata.co.id).

Terhitung sejak 1 Januari 2018, PT Pertamina resmi mengambil alih pengelolaan Blok Mahakam dari operator sebelumnya, yaitu Total E&P Indonesia atau TEPI dengan masa kontrak hingga 31 Desember 2037. Melalui anak usahanya, PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) yang fokus di sektor energi ini berkomitmen menjaga produksi minyak dan gas di blok yang berlokasi di Kalimantan Timur tersebut.

Pengelolaan Blok yang masih menyisakan cadangan sekitar 57 juta barel minyak tersebut diklaim Pertamina siap dilakukan 100 persen tanpa bantuan mitra dan dibantu 10 persen dari participating interest (PI) dari BUMD Kalimantan Timur. Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam mengatakan selama masa peralihan Pertamina telah melakukan berbagai upaya dan koordinasi dengan semua pihak terkait.

Pertamina melihat amanat Pengelolaan Wilayah Kerja (WK) Mahakam sebagai tugas negara yang akan dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai tugas pokok dan fungsi Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara. Pengelolaan akan dilaksanakan dengan menjaga produksi WK Mahakam yang telah melewati masa puncak produksi reservoirnya yaitu pada 2003-2009, mengontrol biaya operasi dan tetap mengedepankan QHSSE (*Quality, Health, Safety, Security and Environment*) dalam operasionalnya.

Beberapa persiapan yang sudah dilakukan Pertamina antara lain transfer pekerja Total E&P Indonesia, yang sudah mendandatangani perjanjian kerja dengan Pertamina, mencapai 98,23%, lalu telah melakukan pengeboran 14 unit sumur dari program 15 sumur pada 2017 dengan pencapaian HSSSE yang baik (www.pertamina.com)

Pertamina juga berhasil menekan biaya pengeboran sumur hingga lebih efisien 23% terhadap anggaran yang direncanakan, mencatat waktu pengeboran lebih cepat hingga 25%, mendapatkan potensi penambangan cadangan hingga 120%, memperoleh penambahan ketebalan reservoir sebesar 115%, dan pelaksanaan mirroring contract atas persetujuan SKK Migas untuk mempercepat proses kontrak dengan pihak ketiga penunjang operasi Blok Mahakam senilai USD 1,2 miliar (www.pertamina.com).

Berdasarkan data SKK Migas, per November 2017, WK Mahakam berproduksi minyak dan kondensat sebesar 52 ribu barel minyak per hari dan 1.360 juta kaki kubik gas bumi per hari. Potensi di Blok Mahakam masih cukup menjanjikan. Cadangan terbukti per 1 Januari 2016 sebesar 4,9 TCF gas, 57 juta barel minyak dan 45 juta barrel kondensat (www.viva.co.id).

Pembagian Participating Interest (PI) Blok Mahakam

Blok Mahakam merupakan salah satu blok gas andalan pemerintah yang terletak di delta Sungai Mahakam, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Hingga kini cadangan minyak dan gas di blok tersebut diperkirakan masih berkisar 105 juta barel dan 4,9 triliun kaki kubik. Mulai 1 Januari 2018, PT Pertamina (Persero) mengambil alih pengelolaan Blok Mahakam setelah 50 tahun beroperasi. Dengan pengalaman mengelola blok migas *offshore* di *North West Java* dan *West Madura*, perusahaan pelat merah ini optimistis mampu mengelola Blok Mahakam dengan baik.

Setelah resmi perpindahan pengelolaan Blok Mahakam dari Total E&P Indonesia (TEPI) ke Pertamina melalui Pertamina Hulu Mahakam (PHM), Provinsi Kaltim dan Kabupaten Kukar termasuk daerah penghasil mendapatkan jatah keuntungan berupa *Participating Interest (PI)*. Sementara itu, meskipun pemerintah telah memberi kekuasaan penuh terhadap Pertamina dalam mengelola Blok Mahakam, namun Pertamina sampai saat ini masih menggandeng TEPI dalam pembagian PI. Jumlah pembagian PI tersebut yakni Kaltim 10 persen, sementara TEPI mendapat 39 persen dan untuk PHM sendiri sebesar 51 persen (www.kaltim.tribunnews.com).

Tabel 4.1. Pembagian *Participating Interest (PI)* Blok Mahakam

Penerima PI Blok Mahakam	Jumlah PI Blok Mahakam
Pertamina Hulu Mahakam (PHM)	51 %
Total E&P Indonesia (TEPI)	39 %
Pemprov Kalimantan Timur	10 %

Sumber : www.kaltim.tribunnews.com

Bagi Kaltim, untuk bisa dapatkan PI 10 persen tersebut, sejak jauh hari daerah diminta untuk membentuk perusahaan patungan antara kedua belah pihak, yakni perusda dari Pemprov dan perusda dari Kukar. Namun perusda dari Kukar inilah yang sampai saat ini belum terbentuk. Imbasnya, untuk sementara waktu, Pemprov Kaltim akan menyiapkan perusda khusus sebagai pengganti sementara Perusda Kukar, yakni Perusda MBS (Melati Bhakti Satya). Ke depan, MBS akan berafiliasi dengan MMP (Mandiri Migas Pratama), Perusda Pemprov yang khusus berkoordinasi dengan PHM terkait persoalan PI tersebut.

Penunjukkan MBS sebagai afiliasi MMP dalam kemitraan dengan PHM tersebut, hanya berlangsung sementara. Hal ini dilakukan sampai Kukar selesai dalam proses pembentukan perusda. Dikelolanya kemitraan dengan PHM oleh MBS dan juga MMP ini disebut tak akan mempengaruhi persentase pembagian PI antara Pemprov Kaltim dan Kukar, yakni tetap pada angka 66, 5 persen untuk Pemprov Kaltim dan 33,5 persen untuk Pemkab Kukar (www.kaltim.tribunnews.com).

Kesimpulan

Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama PT.Pertamina (Persero) dapat dikatakan telah berhasil mengambil alih hak pengelolaan ladang migas Blok Mahakam pasca Kontrak Kerja Sama (KKS) PT.Total E&P Indonesia yang telah beroperasi sekitar 50 tahun di blok tersebut. Upaya pemerintah Kaltim dalam mendukung Pertamina memiliki perjuangan yang panjang dan cukup lama. Namun perjuangan tersebut tidak sia-sia karena pada akhirnya per 1 Januari 2018 secara resmi Blok Mahakam dikelola oleh PT.Pertamina. Pihak Pertamina yang mendapat dukungan dari Pemerintah Kaltim juga dimanfaatkan dengan baik. Pertamina telah melakukan upaya-upaya yang nyata dan berhasil meyakinkan pemerintah Indonesia bahwa pihaknya mampu mengelola Blok Mahakam.

Daftar Pustaka

Buku

Batubara, Marwan. 2014. “*Kembalikan Mahakam – Memang Hak Kami*”, Indonesian Resources Studies (IRESS) – Jakarta

Goldwyn, David & Kalicki, Jan. 2005. *Energy and Security: Toward a New Foreign policy Strategy*. Washington DC: Wodrow Wilson Center Press.

Spero, Joan E.. 1985. *The Politics of International Economic Relations*

Jurnal

Daniel Yergin. 2006. *Ensuring Energy Security*. *Foreign Affairs*. Vol. 85, No. 2

Internet

Akhir Bulan Pertamina Lihat Cadangan Blok Mahakam, dalam <https://migas.esdm.go.id/post/read/Akhir-Bulan,-Pertamina-Lihat-Cadangan-Blok-Mahakam> diakses tanggal 09 Februari 2018

Gubernur Kaltim Minta ARKBM Bergabung, dalam <http://kaltim.tribunnews.com/2014/01/15/gubernur-kaltim-minta-arkbm-bergabung> diakses tanggal 09 Februari 2018

Kaltim Permudah Perizinan Alih Kelola Blok Mahakam, dalam <https://www.antaranews.com/berita/610363/kaltim-permudah-perizinan-alih-kelola-blok-mahakam> diakses tanggal 09 Februari 2018

Kelola Blok Mahakam, Pertamina Dukung Ketahanan Energi Nasional, dalam <http://www.pertamina.com/id/news-room/news-release/kelola-blok-mahakam-pertamina-dukung-ketahanan-energi-nasional> diakses tanggal 09 Februari 2018

Ketahanan Energi: Konsep, Kebijakan dan Tantangan bagi Indonesia”, dalam <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Energy%20Security.pdf>,

Kirim Surat ke Menteri ESDM, Pertamina Siap Kelola Blok Mahakam, dalam <https://migas.esdm.go.id/post/read/Kirim-Surat-ke-Menteri-ESDM,-Pertamina-Siap-Kelola-Blok-Mahakam-%C3%82> diakses tanggal 09 Februari 2018

Nafas Panjang Pertamina dari Blok Mahakam, dalam <https://www.viva.co.id/indepth/fokus/992806-nafas-panjang-pertamina-dari-blok-mahakam> diakses tanggal 09 Februari 2018

Pemuda Kaltim Siap Berperang Merebut Blok Mahakam, dalam <https://regional.kompas.com/read/2014/11/24/19352301/Pemuda.Kaltim.Siap.Berperang.Merebut.Blok.Mahakam> diakses tanggal 09 Februari 2018

Perjuangan Blok Mahakam Harus Komprehensif dan Integral, dalam <https://kaltim.antaranews.com/berita/11239/perjuangan-blok-mahakam-harus-komprehensif-dan-integral> diakses tanggal 09 Februari 2018

Pertamina bakal Investasi Rp.302 Triliun di Blok Mahakam, dalam <http://news.lewatmana.com/pertamina-bakal-investasi-rp-302-triliun-di-blok-mahakam/> diakses tanggal 09 Februari 2018

Pertamina Sudah Mengajukan Proposal Blok Mahakam, dalam <http://industri.kontan.co.id/news/pertamina-sudah-mengajukan-proposal-blok-mahakam> diakses tanggal 09 Februari 2018

Sejarah Blok Mahakam, dalam <http://satunegeri.com/sejarah-blok-mahakam/>, diakses pada 20 November 2017

Serahkan Pengelolaan Blok Mahakam kepada BUMN Sesuai amanat Konstitusi, dalam <https://www.change.org/p/presiden-ri-menteri-esdm-kepala-bp-migas-dan-dpr-ri-serahkan-pengelolaan-blok-mahakam-kepada-bumn-sesuai-amanat-konstitusi>, diakses pada 20 April 2017

Setelah Blok Mahakam Dikelola Pertamina, Kaltim Bisa Terima Belasan Triliun Rupiah, dalam <http://kaltim.tribunnews.com/2017/12/29/setelah-blok-mahakam-dikelola-pertamina-kaltim-bisa-terima-belasan-triliun-rupiah>, diakses tanggal 11 April 2018

Strategi Pertamina Kelola Blok Mahakam, dalam <https://katadata.co.id/infografik/2017/12/18/strategi-pertamina-kelola-blok-mahakam> diakses tanggal 09 Februari 2018